



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan adalah dengan memberikan/menyampaikan informasi secara detil kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana suatu instansi pemerintah maupun satuan kerja dalam instansi tersebut dituntut untuk memiliki suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi, yang lebih dikenal dengan istilah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, terutama dalam hal permohonan pelayanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W14-74.HM.01.02 Tahun 2022. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan dapat semakin mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik.

2. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
- b) Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
- Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi atas informasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat;
 - Memudahkan pendokumentasian atas informasi layanan yang disampaikan kepada masyarakat;
 - Melihat sampai sejauh mana capaian layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kendala yang dihadapi serta penanganan/tindak lanjut atas kendala yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik, yaitu permohonan pelayanan hukum dalam bidang kenotariatan maupun KI, permohonan magang untuk mahasiswa, dan permohonan lainnya sesuai dengan kewenangan di lingkungan satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dasar

- a. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
 - j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

C. Hasil Yang Dicapai

Pada tahun 2021 terdapat 89 permohonan informasi masuk melalui kanal PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh permohonan informasi diajukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. PPID Kanwil Kemenkumham DIY telah melakukan pemenuhan secara lengkap terhadap semua pengajuan permohonan informasi. Berikut adalah tabel rekapitulasi pelayanan informasi publik Kanwil Kemenkumham DIY tahun 2021.

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	Tanggal Permohonan Masuk	Nama Pemohon	Informasi yang dibutuhkan	Tanggal Tindak Lanjut	Waktu Pemenuhan (hari)	Status
1	22 Desember 2020	Fajar Husein	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian, terkait pelaksanaan penelitian di Kanwil Kemenkumham DIY bidang Kekayaan Intelektual pada tahun 2020	4 Januari 2021	14	Dipenuhi
2	24 Desember 2020	Rahesa Wirapandya Permana	Persyaratan melaksanakan penelitian dan pengambilan data serta wawancara untuk tugas akhir pembuatan skripsi di Rutan Kelas IIB Wates	8 Januari 2021	16	Dipenuhi
3	9 Januari 2021	Ravikha Naeda	Melaporkan kendala SIEMON untuk unduh dan cetak laporan bulanan Desember 2020	12 Januari 2021	3	Dipenuhi
4	11 Januari 2021	Arafiq Rachman	Melaporkan kendala SIEMON untuk unduh dan cetak laporan bulanan	12 Januari 2021	1	Dipenuhi
5	13 Januari 2021	Lusi	Mekanisme Revisi penulisan penjudulan Akta pada Laporan Bulanan Bulan Desember 2020 yang sudah terkirim ke SIEMON	14 Januari 2021	1	Dipenuhi

6	13 Januari 2021	Yulia	Proses pengurusan HAKI dan Paten	14 Januari 2021	1	Dipenuhi
7	14 Januari 2021	Winda	Website SIEMON lambat, gagal saat menyimpan laporan legalisasi dan muncul notifikasi Error	14 Januari 2021	0	Dipenuhi
8	19 Januari 2021	Nadia N. Sari	Konfirmasi Kelanjutan surat izin penelitian Layanan Hukum dan HAM yang sudah dikirimkan pada 8 Januari 2021 dan melaksanakan penelitian pada 17-31 Januari 2021	19 Januari 2021	0	Dipenuhi
9	25 Januari 2021	Pambayun Pulung M.S. Sinandang	Persyaratan magang bagi mahasiswa yang akan melakukan magang di Kanwil Kemenkumham DIY periode Mei-Juni 2021	25 Januari 2021	0	Dipenuhi
10	13 Januari 2021	Tito Kurniawan	Persyaratan ijin pra penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta tanpa melampirkan proposal penelitian dan lama verifikasi surat ijin penelitian di SIPASTA	14 Januari 2021	1	Dipenuhi

11	25 Januari 2021	Ahmad Fajar Tabroni	Konfirmasi pengajuan permohonan penelitian mengenai hak cipta	26 Januari 2021	1	Dipenuhi
12	30 Januari 2021	Devi Septiani	Konfirmasi status permohonan chapter book sudah diterima namun pemohon belum menerima email dari DJKI perihal permohonan dengan nomor pencatatan 000210556	1 Februari 2021	2	Dipenuhi
13	29 Januari 2021	Mualim	Persyaratan magang di Kanwil Kemenkumham DIY	1 Februari 2021	3	Dipenuhi
14	1 Februari 2021	Tya	Pelaporan bulanan notaris bulan Agustus 2020 yang sudah dikirimkan terdapat kesalahan input penomoran suratnya dan ingin direvisi	1 Februari 2021	0	Dipenuhi
15	2 Februari 2021	Otti Restu	Kendala hapus laporan bulanan Notaris di SIEMON dan ingin direvisi karena kesalahan input nomor legalisasi	3 Februari 2021	1	Dipenuhi

16	2 Februari 2021	Febriansyah	Penerimaan CPNS tahun 2021 formasi penjaga tahanan	3 Februari 2021	1	Dipenuhi
17	3 Februari 2021	Wira	Kendala tampilan SIEMON tertutup pada kanan bawah sehingga tidak dapat melihat tautan laporan bulanan	3 Februari 2021	0	Dipenuhi
18	2 Februari 2021		Konfirmasi format penomoran pada Nomor surat laporan bulanan Notaris di aplikasi SIEMON	3 Februari 2021	1	Dipenuhi
19	3 Februari 2021	Retika	informasi terkait magang mahasiswa	4 Februari 2021	1	Dipenuhi
20	4 Februari 2021		Informasi layanan legalisasi dokumen di Kanwil Kemenkumham DIY	4 Februari 2021	0	Dipenuhi
21	4 Februari 2021		Informasi pendaftaran HAKI untuk UMKM	4 Februari 2021	0	Dipenuhi

22	1 Februari 2021	Adhi	Informasi prosedur pendaftaran KI Komunal minuman Dawet Ayu Banjarnegara	1 Februari 2021	0	Dipenuhi
23	28 Januari 2021	Hendy	Mohon pengiriman sertifikat merek MUBY SKINCARE yang diajukan pada tahun 2017 dan akan digunakan untuk pengalihan hak mereknya kepada Megawaty yang merupakan istri pemohon dan akan diajukan ke DJKI	28 Januari 2021	0	Dipenuhi
24	9 Februari 2021	Ika Afifah	Informasi Pendaftaran akun e-Hak Cipta dengan email yang sama untuk pendaftaran sentra HKIdi Univ. 'Aisyiyah Yogyakarta	9 Februari 2021	0	Dipenuhi
25	2 Februari 2021	Bagus	Kunjungan ke lapas dalam rangka langkah hukum selanjutnya setelah pidana yakni perdata apakah dimungkinkan	3 Februari 2021	1	Dipenuhi
26	4 Februari 2021	Sriyanti	Informasi materi seminar OPINI dan sertifikat peserta	9 Februari 2021	5	Dipenuhi

27	13 Januari 2021	Agustinus Janarko Sigit Pradetio	Laporan bulanan notaris pada SIEMON tidak dapat diunduh	13 Januari 2021	0	Dipenuhi
28	10 Februari 2021	Susanto	Terkait surat edaran untuk melengkapi data alamat pada aplikasi SIEMON	10 Februari 2021	0	Dipenuhi
29	23 Februari 2021	Salsabila Laili Zahra	Magang di kemenkumham untuk freshgraduate	23 Februari 2021	0	Dipenuhi
30	4 Januari 2021	Rindang Atieska	Konfirmasi surat rekomendasi PKL yang telah diajukan pada 29 Desember 2020 yang diajukan ke petugas loket layanan masyarakatan a.n. Made	4 Januari 2021	0	Dipenuhi
31	19 Februari 2021	Rindang Atieska	Persyaratan penelitian di Rutan Kelas IIB Bantul	23 Februari 2021	4	Dipenuhi

32	23 Februari 2021	Adi Haryadi	Pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan PP yang baru saja diterbitkan pemerintah untuk usaha mikro-kecil apakah saat ini sudah dapat dilakukan pendaftarannya	23 Februari 2021	0	Dipenuhi
33	18 Februari 2021	Buyung	Kendala pendaftaran HAKI secara online, unggah file jpeg/jpg error	23 Februari 2021	5	Dipenuhi
34	19 Februari 2021	Abi Alif	Prosedur ijin penelitian di Rutan Bantul melalui kanwil Kemenkumham DIY	23 Februari 2021	4	Dipenuhi
35	23 Februari 2021	Almira Leilani	Magang di Kemenkumham DIY	23 Februari 2021	0	Dipenuhi
36	22 Februari 2021	Agung Kharmanta, S.Si.	berkas pengaduan Yankomas yang dikirimkan pada 25 Desember 2020 apakah sudah ada tindak lanjutnya	23 Februari 2021	1	Dipenuhi

37	25 Februari 2021	Yogya Willy Handoyo	Prosedur pendirian PT dan CV tahun 2021	26 Februari 2021	1	Dipenuhi
38	25 Februari 2021	Heri Yanto Suryo Wibowo	Cara register PT perseorangan menurut UU Cipta Kerja	26 Februari 2021	1	Dipenuhi
39	23 Pebruari 2021	Desy	Perbaiki nama PT pada sertifikat Merk	23 Pebruari 2021	<u>0</u>	Dipenuhi
40	1 March 2021	Buyung	Biaya yang sudah dibayarkan apabila pendaftaran permohonan merek ditolak	1 March 2021	0	Dipenuhi

41	1 March 2021		Persyaratan pendaftaran CPNS beda domisili	3 March 2021	2	Dipenuhi
42	4 March 2021	Linda Rahmawati	Proses legalisasi dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk keperluan pendaftaran beasiswa	4 March 2021	0	Dipenuhi
43	8 March 2021	Ayu	Login alamat pelayanan SIPASTA	8 March 2021	0	Dipenuhi
44	12 March 2021	Ina Muhammad	Informasi terima surat penolakan permohonan atas merek parfum denhan basic dari tanggal permohonan 28 agustus 2020, yang mana baru tanggal 6 Maret 2021 diterima melalui email	12 March 2021	0	Dipenuhi
45	15 March 2021	Desi Yunitasari dan Devi Yusvitasari	Permohonan informasi mahasiswa magang bantuan hukum melalui virtual	15 March 2021	0	Dipenuhi
46	15 March 2021	Mutiara Anggi	Permohonan informasi mahasiswa magang yang telah melakukan tesisakan menyerahkan hasil penelitian	15 March 2021	0	Dipenuhi
47	17 March 2021	Setia Budi	Permohonan Pendaftaran Merk	17 March 2021	0	Dipenuhi

48	17 March 2021	Pamuji	Permohonan kendala aplikasi SiEmon	17 March 2021	0	Dipenuhi
49	19 March 2021	Siwi	Permohonan informasi input laporan Siemon dalam setiap bulan	23 March 2021	4	Dipenuhi
50	23 March 2021	Yuli	Permohonan informasi alamat PIC untuk proses pengajuan WBK/WBBM	23 March 2021	0	Dipenuhi
51	26 March 2021	Elvina Magista	Permohonan Informasi Magang	26 March 2021	0	Dipenuhi
52	26 March 2021	Putri	Permintaan informasi pengajuan akta pendirian komunitas gangsadewa	26 March 2021	0	Dipenuhi
53	26 March 2021	Hendy	Permohonan informasi dan konfirmasi pengalihan sertifikat Merek	26 March 2021	0	Dipenuhi
54	29 March 2021	Sangga	Permohonan layanan pemesanan nama perkumpulan	31 March 2021	2	Dipenuhi
55	2 April 2021	Muhammad Hatta	Permohonan informasi CPNS	5 April 2021	3	Dipenuhi
56	5 April 2021	Rr. Clarisa	Permohonan informasi perpanjangan	5 April 2021	0	Dipenuhi

			Paspor untuk bekerja di Malaysia			
57	13 April 2021	Yani	Permohonan informasi pelaporan melalui aplikasi Siemon	13 April 2021	0	Dipenuhi
58	19 April 2021	Fajar Husein	Permohonan informasi lanjutan terkait penelitian yang dilakukan di Kanwil pada layanan KI	20 April 2021	1	Dipenuhi
59	19 April 2021	Tri Murtini	Permohonan bantuan atas kendala aplikasi Siemon	20 April 2021	1	Dipenuhi
60	14 April 2021	Mirza	Permohonan informasi pendirian dan pendaftaran PT	21 April 2021	7	Dipenuhi
61	22 April 2021	Yogha Rasyid	Permohonan Informasi pendaftaran CPNS	27 April 2021	5	Dipenuhi
62	23 April 2021	Hanif Fathoni	Permohonan Informasi Legalisir ijazah	27 April 2021	4	Dipenuhi
63	27 April 2021	Syafarani Alfitri	Permohonan informasi tes CPNS	27 April 2021	0	Dipenuhi
64	27 April 2021	Eko Sugiarto	Permohonan informasi PT Tunggal atas nama 1 orang	27 April 2021	0	Dipenuhi
65	27 April 2021	Ida Rifdiah	Permohonan informasi sertifikat webinar	27 April 2021	0	Dipenuhi
66	30 April 2021	Putri Anggarini Mike Putri	Permohonan Informasi Penelitian	03 May 2021	3	Dipenuhi

67	03 Mei 2021	SafriSa	Permohonan Bantuan penyelesaian masalah terkait dengan hukum	3 May 2021	0	Dipenuhi
68	03 Mei 2021	Lala	Permohonan informasi	03 May 2021	0	Dipenuhi
69	11 May 2021	Sam CNL	Permohonan informasi tentang Naturalisasi	11 May 2021	0	Dipenuhi
70	19 May 2021	Jasmine Natasha	Permohonan informasi Magang	20 May 2021	1	Dipenuhi
71	4 Juni 2021	Charlisa	Permohonan informasi tes catar	4 June 2021	0	Dipenuhi
72	4 June 2021	Fadhil	Permohonan informasi atas kendala Siemon	4 June 2021	0	Dipenuhi
73	7 June 2021	Ahmad Nurul Nasrudin	Permohonan Informasi atas penolakan permohonan Merek	7June 2021	0	Dipenuhi
74	7 June 2021	Viony rahmadani	Permohonan informasi Magang	7June 2021	0	Dipenuhi
75	7 June 2021	Nada	Permohonan Informasi dan syarat mengajukan permohonan KI	7June 2021	<u>0</u>	Dipenuhi

76	7 June 2021	Ikhsan	Permohonan informasi panduan pemeriksaan notaris 2020	7June 2021	0	Dipenuhi
77	7 June 2021	Fanny Yunita Lauhatta	Permohonan Informasi Penutup Buku Akta pemeriksaan 2020	8 June 2021	1	Dipenuhi
78	8 June 2021	Arum	Permohonan Informasi kurangnya input laporan akta	8 June 2021	0	Dipenuhi
79	8 June 2021	Harmumtiwati	Permohonan Informasi Siemon	8 June 2021	0	Dipenuhi
80	10 June 2021	Sevi Sian Fadhila	Permohonan Informasi Magang	24 June 2021	14	Dipenuhi
81	24 June 2021	Panji Wening	Permohonan Informasi KI Online	24 June 2021	0	Dipenuhi
82	24 June 2021	M. Giffar Putranto	Permohonan Informasi Formasi CPNS	24 June 2021	0	Dipenuhi
83	24 June 2021	Desy	Permohonan Informasi Merek Online	24 June 2021	0	Dipenuhi
84	30 June 2021	Antony Setyo Rahmanto	Permohonan Informasi Pendaftaran KI	30 June 2021	0	Dipenuhi
85	30 June 2021	Joni Prasetyo	Permohonan Informasi Pendaftaran Merek	30 June 2021	0	Dipenuhi
86	6 July 2021	Danang	Permohonan Informasi CPNS	13 July 2021	7	Dipenuhi
87	8 July 2021	Rifki	Permohonan Informasi CPNS	13 July 2021	5	Dipenuhi
88	13 July 2021	Ederic Ega A	Permohonan Informasi Legalisir Bukti Nikah	14 July 2021	1	Dipenuhi
89	15 July 2021	Veronika	Permohonan Informasi KI Online	15 July 2021	0	Dipenuhi

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Komitmen tersebut didukung dengan secara konsistennya dilakukan pengembangan dalam pelayanan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Saran

Penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sarana prasarana berupa perangkat teknologi informasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana teknologi informasi akan sangat membantu dalam penyelenggaraan PPID yang lebih baik lagi ke depannya.

E. Penutup

Demikian laporan Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Budi Argap Situngkir

NIP. 197510211998031001